



<https://doi.org/10.56552/jisipol.v6i2.256>

Implementasi Program Kampung Iklim Di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang

¹⁾ Edward Mandala, ²⁾ Rendra Setyadiharja, ³⁾ Nurbaiti Usman Siam, ⁴⁾ Suhardi
Mukhlis, ⁵⁾ Zangki Firdaus

^{1), 2), 3), 4), 5)} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik Raja Haji Tanjungpinang

Email: zangki.firdaus@gmail.com

Abstract

The Climate Village Program aims to create villages or neighborhoods that are sustainable in terms of the environment and economy, while also reducing the impacts of climate change by increasing community participation in tangible actions to address climate challenges. However, the phenomenon found shows that the majority of the community and the Climate Village Implementation Group are no longer actively carrying out ProKlim activities.

This study aims to evaluate the implementation of the Climate Village Program (ProKlim) in Kampung Bugis Village. Its implementation is based on the Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 concerning the Climate Village Program. This study applies the program implementation theory by Van Meter and Van Horn, which examines various factors influencing the success of a program. The population in this study consists of the Climate Village Implementing Group in Kampung Bugis Village, with a total of 74 members. The research sample was selected using purposive sampling, involving six individuals from two different groups to obtain representative data. This study employs a qualitative method. The study concludes that the implementation of the Climate Village Program in Kampung Bugis Village aligns with its intended objectives, although some aspects still need improvement to achieve more optimal results. The researcher suggests that the government enhance support and facilities for the Climate Village Implementing Group and encourage active community participation. Continuous training and education should be improved to strengthen the group's capacity in addressing climate change challenges. Additionally, a sustainable evaluation and monitoring mechanism is needed to periodically assess the program's performance and ensure it runs as planned and achieves its desired goals.

Keywords: Climate Village Program (ProKlim), Climate Change, Program Implementation.

Abstrak

Program Kampung Iklim bertujuan untuk menciptakan desa atau kampung yang berkelanjutan dari segi lingkungan dan ekonomi, serta mengurangi dampak perubahan iklim dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tindakan nyata menghadapi perubahan iklim. Namun, fenomena yang ditemukan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat dan Kelompok Pelaksana Kampung Iklim kini tidak lagi aktif menjalankan kegiatan-kegiatan ProKlim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kelurahan Kampung Bugis. Dasar pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program

Kampung Iklim. Penelitian ini menggunakan teori implementasi program Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu program. Populasi dalam penelitian ini adalah Kelompok Pelaksana Kampung Iklim di Kelurahan Kampung Bugis, dengan total populasi sebanyak 74 orang. Sampel penelitian diambil secara purposive sampling, terdiri dari enam orang yang diambil dari dua kelompok berbeda untuk mendapatkan data yang representatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Kampung Iklim di Kelurahan Kampung Bugis berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Peneliti menyarankan agar pemerintah meningkatkan dukungan dan fasilitas untuk Kelompok Pelaksana Kampung Iklim, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. Pelatihan dan edukasi berkelanjutan perlu ditingkatkan untuk memperkuat kapasitas kelompok dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Selain itu, diperlukan mekanisme evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan untuk menilai kinerja program secara periodik dan memastikan bahwa program ini berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Keywords: *Program Kampung Iklim (ProKlim), Perubahan Iklim, Implementasi Program.*

PENDAHULUAN

Program Kampung Iklim atau dapat kita singkat menjadi ProKlim merupakan sebuah gagasan atau inisiatif berskala nasional yang berorientasi pada iklim dan lingkungan, program diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dalam implementasinya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan pemerintah daerah sebagai pelaksana serta seluruh lapisan masyarakat sebagai partisipan aktif. Pada Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat lima program utama yang mendukung prioritas nasional, yang pertama Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, kedua Program Kualitas Lingkungan Hidup, ketiga Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, keempat Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, dan kelima adalah Program Dukungan Manajemen.

Program Kampung Iklim ini adalah bagian dari Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim yang bertujuan untuk menciptakan desa atau kampung yang bisa lebih berkelanjutan dari segi lingkungan dan ekonomi, sekaligus mengurangi dampak perubahan iklim dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tindakan nyata menghadapi perubahan iklim. Langkah-langkah yang diambil termasuk pengelolaan air, penghijauan, pengelolaan sampah, dan penggunaan energi yang lebih efisien. Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan wilayah setingkat rukun warga hingga desa/ kelurahan yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim dan lebih berkelanjutan secara lingkungan. Program Kampung Iklim juga dapat mencakup beberapa hal seperti pendidikan, pelatihan, dan promosi



penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan, serta pembangunan infrastruktur yang sudah direncanakan sedemikian rupa agar lebih ramah lingkungan dan kuat menghadapi berbagai jenis bencana alam yang mungkin terjadi karna perubahan iklim.

Secara sederhana, Program Kampung Iklim adalah upaya kolaboratif untuk membantu kampung atau desa menjadi lebih siap dan kuat dalam menghadapi perubahan iklim dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Dalam konteks Program Kampung Iklim (ProKlim) yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dapat memiliki peran penting dalam mendukung pembentukan dan pelaksanaan ProKlim di wilayahnya.

Tahapan Penyelenggaraan Program Kampung Iklim mencakup persiapan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pengembangan dan penguatan aksi. Dalam penelitian Gunawan (2023), Program Kampung Iklim mengangkat 2 indikator penting yakni Adaptasi dan Mitigasi dalam melaksanakan kemitraan atau kerjasama terhadap pihak yang bisa dan mengetahui program pelaksanaan. Dengan tujuan yang berfokus kepada pengurangan dalam perubahan iklim dan memberdayakan sumberdaya manusia yang berada disekitar, menjadi hal yang penting untuk menerapkan berbagai rancangan dan konsep yang terintegritas secara lokal maupun Nasional. Untuk mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim, juga dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Oktaviana (2017), dikatakan bahwa Proklm dapat berjalan sukses karena adanya keterlibatan para aktor yaitu aktor Pemerintah, aktor pendukung dan aktor pelaksana yang bersifat partisipatif.

Perjalanan Kampung Bugis sebagai bagian dari ProKlim selama hampir lima tahun (dari 2019) telah melahirkan berbagai kegiatan komponen Proklm bersama masyarakat setempat. Kegiatan berbentuk adaptasi yang telah dilaksanakan diantaranya adalah membangun sejumlah sumur bor dan tong-tong penampung air untuk mengatasi kekurangan sumber air bersih yang terjadi di masyarakat pesisir, sumur dan tong penampungan air ini juga digunakan dalam mengatasi kekeringan di lahan pertanian. Pada penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada implementasi Program Kampung Ikim di Kelurahan Kampung Bugis, dalam hal ini peneliti akan melihat pelaksanaan Proklm tersebut melalui Standard Dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Koordinasi Dan Kerjasama, Kondisi Sosial, Politik, Dan Ekonomi, Karakteristik Agen Pelaksana, Dan Disposisi Implementor.



Menurut informasi dari salah satu ketua RT di Kelurahan Kampung Bugis pada wawancara singkat tanggal 13 Mei 2024 mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat dan kelompok Pelaksana Kampung Iklim sudah tidak lagi aktif menjalankan kegiatan-kegiatan ProKlim. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk dilaksanakan, mengingat Program Kampung Iklim merupakan salah satu indikator terwujudnya Smart City di Kota Tanjungpinang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Program Kampung Iklim di Kota Tanjungpinang.

KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep Pemerintah dan Pemerintahan.

Menurut Ndura (2015:5), pemerintah diartikan sebagai organ yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan layanan publik dan memiliki tanggungjawab dalam menyelenggarakan layanan sipil bagi setiap individu melalui interaksi dengan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerima layanan tersebut saat dibutuhkan, sesuai dengan harapan dan kebutuhan yang diajukan.

2. Implementasi

Menurut penelitian yang disebutkan oleh Wahab (2004:65), Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn menjelaskan bahwa implementasi adalah proses di mana individu, pejabat, atau lembaga pemerintah atau swasta melakukan langkah-langkah tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Subarsono (2005:99) menyatakan bahwa menurut Van Meter dan Van Horn, terdapat enam faktor yang berpengaruh pada kinerja implementasi kebijakan yaitu: "Pertama, standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur untuk menghindari berbagai interpretasi dan konflik di antara agen pelaksana. Kedua, implementasi memerlukan dukungan sumber daya manusia dan non-manusia. Ketiga, koordinasi dan kerjasama antar instansi sangat penting dalam pelaksanaan program. Keempat, karakteristik agen pelaksana seperti birokrasi, norma, dan pola hubungan akan memengaruhi pelaksanaan program. Kelima, kondisi sosial, politik, dan ekonomi seperti dukungan kelompok kepentingan, opini masyarakat, dan dukungan politik juga turut memengaruhi implementasi kebijakan. Terakhir, disposisi implementor, termasuk respons terhadap kebijakan, pemahaman terhadap kebijakan, dan intensitas preferensi nilai, juga memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan."



3. Program

Menurut Suharsimi Arikunto (2012:291) Program dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang direncanakan dengan seksama.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut pandangan I Made L Mertha Jaya (2020:110) penelitian Kualitatif haruslah diteliti secara menyeluruh terhadap suatu objek yang kemudian dijelaskan dengan bahasa yang diambil dari data yang sudah valid. Penelitian dilakukan di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang, Pemilihan lokasi penelitian sangat penting karena akan mempengaruhi validitas dan generalisasi hasil penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah Kelompok Pelaksana Kampung Iklim yang ada di Kelurahan Kampung Bugis, dimana terdapat enam kelompok yang memiliki pengurus sebanyak 12 hingga 14 orang, dan jika di totalkan seluruh populasi adalah 74 orang. Sampel di ambil dari 2 kelompok Pelaksana Kampung Iklim, yakni dari kelompok yang dianggap paling berhasil (Kelompok Sungai Ladi Asri, diRW 3) dan kelompok yang masih belum berkembang (Kelompok Sumaru Manggrove di RW5), kemudian dipilih 2 orang ketua dan 4 orang anggota kelompok, sehingga total sample adalah 6 orang. Sumber dan Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan menitik beratkan pada wawancara dan observasi partisipatoris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk melihat bagaimana Implementasi Program Kampung Iklim di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang dijalankan, penelitian dilakukan dengan menggunakan teori dari DonaldS.Van Meter dan Carl E. Van Horn (Subarsono, 2005:99) yang menyatakan terdapat enam faktor yang berpengaruh pada kinerja implementasi kebijakan yaitu: pertama standar dan sasaran kebijakan, kedua sumberdaya, ketiga koordinasi dan kerjasama, keempat karakteristik agen pelaksana, kelima kondisi sosial, politik, dan ekonomi, keenam disposisi implementor (sikap para pelaksana).



a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Indikator dalam faktor ini adalah adanya keterukuran standar serta sasaran kebijakan (tujuan) program, kemudian memahami hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim. Dari hasil wawancara, dan observasi dapat dijelaskan dalam implementasi ProKlim masih terdapat perbedaan pemahaman tentang standar dan tujuan ProKlim diantara anggota kelompok pelaksana. Menjaga kekompakan dan partisipasi aktif masyarakat tetap menjadi tantangan utama yang perlu diatasi untuk memastikan kelanjutan dan keberhasilan jangka panjang dari ProKlim.

b. Sumber Daya

Indikator dalam factor ini adalah berapa banyak personel yang ditugaskan untuk implementasi, serta bagaimana ketersediaan sumber daya lainnya yang bermanfaat. Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa ProKlim Sumaru Manggrove RW.5 memiliki kesiapan dan keaktifan sumber daya manusia yang baik, didukung oleh keterlibatan aktif dalam kegiatan kolaboratif dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal. Dukungan tambahan dari pemerintah dalam bentuk alat pengolahan sampah akan lebih mengoptimalkan program. Sedangkan ProKlim Sungai Ladi Asri RW.3 memiliki sumber daya manusia yang juga cukup dan aktif dalam beberapa aspek, namun perlu perbaikan dalam pengelolaan TPS3R untuk mengatasi masalah vakumnya pengolahan pupuk. Sumber daya alam yang tersedia juga perlu terus dioptimalkan untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi lokal.

c. Koordinasi dan Kerjasama

Indikator dalam faktor ini adalah bagaimana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim, serta bagaimana kerjasama dalam kelompok pelaksana iklim berjalan. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa komunikasi dengan pemerintah berjalan baik dan lancar, baik melalui media digital seperti WhatsApp maupun pertemuan langsung. Namun, ada kasus di mana komunikasi dinilai kurang dan perlu adanya perbaikan. Kerjasama dalam kelompok umumnya dinilai baik, dengan banyak anggota yang masih aktif berpartisipasi. Namun, ada beberapa kasus di mana kerjasama berkurang dan beberapa anggota vakum, menunjukkan perlunya strategi untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan partisipasi penuh dari semua anggota.



d. Karakteristik Agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana seperti tingkat kepatuhan terhadap prosedur birokrasi, norma dan komunikasi internal, dan pola hubungan dapat mempengaruhi implementasi program. Informan menyatakan bahwa pembentukan kelompok awalnya sesuai dengan prosedur pemerintah, menunjukkan adanya kepatuhan pada awal pembentukan. Namun, kelompok ini tidak lagi berjalan sesuai dengan prosedur berkelanjutan yang diharapkan. Ini menunjukkan adanya masalah dalam mempertahankan operasi dan keberlanjutan program ProKlim. Komunikasi dalam kelompok juga telah menurun, menunjukkan adanya penurunan kualitas interaksi dan koordinasi diantara anggota. Tidak adanya agenda kegiatan rutin dan evaluasi menandakan kurangnya struktur dan disiplin dalam pelaksanaan program.

e. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi

Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi juga turut mempengaruhi implementasi kebijakan, hal ini dapat dilihat dari bagaimana manfaat ekonomis dari Program kampung Iklim ini, dan bagaimana opini atau pendapat masyarakat akan pentingnya pelaksanaan program ini. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat dipahami bahwa Program Kampung Iklim memiliki dampak positif yang signifikan terhadap ekonomi lokal, meningkatkan ketahanan pangan, dan memberikan manfaat tambahan melalui pengelolaan limbah rumah tangga. Partisipasi dan dukungan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan program, dan keberhasilan ini sangat bergantung pada keaktifan dan kemampuan kelompok penggerak dalam menggerakkan dan memotivasi warga. Meskipun ada tantangan dalam pemasaran dan partisipasi penuh masyarakat, program ini berhasil menciptakan kegiatan yang bermanfaat dan menyenangkan bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran lingkungan, dan solidaritas komunitas. Edukasi dan dukungan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam ProKlim.

f. Disposisi Implementor

Sikap yang positif dan motivasi yang tinggi akan mendorong para pelaksana untuk menjalankan kebijakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini dapat dilihat dari dukungan dan kesediaan implementor dalam melaksanakan program, serta pemahaman pelaksana terhadap tujuan kebijakan Program Kampung Iklim. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa mayoritas



informan menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendukung dan melanjutkan ProKlim, yang merupakan faktor penting untuk keberhasilan jangka panjang program. ProKlim dinilai berjalan sesuai tujuan di beberapa RW (RW.3, RW.4, RW.5), menunjukkan keberhasilan dalam implementasi program di wilayah tersebut. Ada tantangan dalam pelaksanaan ProKlim secara keseluruhan di Kelurahan Kampung Bugis, dengan beberapa RW tidak lagi aktif dan masalah yang perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan program secara merata. Secara garis besar program ini cukup berhasil meningkatkan kesadaran lingkungan di masyarakat, meskipun tidak semua masyarakat memiliki pemahaman detail tentang program ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Standar dan sasaran kebijakan Implementasi ProKlim di Kelurahan Kampung Bugis telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim. Sumber daya manusia yang tersedia cukup aktif dan siap mendukung pelaksanaan ProKlim. Keterlibatan berbagai kelompok masyarakat seperti nelayan, petani, pengolah sampah dan kelompok pengolahan ikan menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap program ini. Koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, kelompok pelaksana, dan masyarakat berjalan dengan baik. Kerjasama juga terbuka dengan pihak lain seperti dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Karakteristik agen pelaksana yang terlibat dalam ProKlim di Kelurahan Kampung Bugis menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap prosedur yang ada. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat sangat mendukung pelaksanaan ProKlim. Disposisi implementor, yakni sikap dan komitmen dari para pelaksana program, menunjukkan kesungguhan dalam menjalankan ProKlim. Secara keseluruhan, implementasi ProKlim di Kelurahan Kampung Bugis berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Dukungan tambahan dari pemerintah dalam bentuk alat dan fasilitas, serta perbaikan dalam struktur internal dan komunikasi kelompok pelaksana, akan sangat membantu dalam memperkuat program ini dan memastikan keberlanjutannya.

Saran



Pemerintah diharapkan memberikan dukungan tambahan berupa alat dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara kelompok pelaksana dan pemerintah. Pembentukan sistem komunikasi yang lebih terstruktur dan terencana, seperti agenda pertemuan rutin dan evaluasi kegiatan, akan membantu menjaga kualitas interaksi dan koordinasi di antara anggota kelompok. Pelatihan dan pendampingan bagi agen pelaksana perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang prosedur dan tujuan ProKlim. Program yang melibatkan partisipasi sukarela dari masyarakat harus terus didorong dengan memberikan insentif dan pengakuan atas kontribusi mereka. Perlu adanya mekanisme evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan untuk menilai kinerja program secara periodik. Hal ini akan memungkinkan identifikasi masalah sejak dini dan penerapan solusi yang tepat untuk memastikan bahwa program ProKlim berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan Program Kampung Iklim di Kelurahan Kampung Bugis dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta lingkungan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anggara, Sahya. 2015. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi. 2019. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2012. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahri, Syamsul, dkk. 2020. Model Implementasi Program Lembaga Penjaminan Mutu. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Gunawan, R., Kurnianingsih, F., & Setiawan, R. (2023). Penerapan Konsep Smart Environment Melalui Program Kampung Iklim Menuju Tanjungpinang Smart City (Studi kasus Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari). *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(2), 303-320.
- Hermon, Dedi. 2018. Mitigasi Perubahan Iklim. Padang: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jaya, I Made Laut Mertha. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori,



- Penerapan, dan RisetNyata. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Kaelan. 2012. Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner. Yogyakarta: Paradigma.
- Kriyantono, R.2020.Teknik prakti sriset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran. Rawamangun: Prenadamedia Group.
- Labolo, Muhadam. 2014. Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian,Teori, Konsep dan Pengembangannya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2015. Kybernology: Ilmu pemerintahan baru1. Jakarta: Rineka Cipta.
- Oktaviana, R. F., & Edison, R. S. Analisis Jejaring Aktor Dalam Program Kampung Iklim Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang. Analysis Of Actor Networks In The Climate Village Program, Bukit Cermin Sub-District, Tanjungpinang City.
- Setiani, Putri. 2020. Sains Perubahan Iklim. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Smith, Thomas B. 1973. The Policy Implementation. Journal of Policy Science.Vol 4, No.2.
- Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.
- Susanti, A. A., Antika, A. A., Pratama, R., Pradana, F. G., Handayani, S., & Sutaryono. 2022. Implementasi dan Pengembangan Program Unggulan Kampung Iklim (Proklam) di Desa Kertonatan. Buletin KKN Pendidikan, 4(1), 58-68.

Dokumen:

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012. Tentang Program Kampung Iklim.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.84/MenLHK-Setjen/Kum.1/11/2016.Tentang Program Kampung Iklim.



Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim
Nomor:P.4/PPI/APS/PPI.6/3/2021.Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program
Kampung Iklim.

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 18 Tahun 2021.Tentang Program
Kampung Iklim di Kepulauan Riau.

SuratKeputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Nomor: SK.1173 /MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2022. Tentang
Rencana Kerja Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023.

Surat Keputusan Ketua STISIPOL Raja Haji Nomor: 334/B2/42/2006. Tentang Tata
Cara Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi.

